

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Partai NasDem

1. Bagaimana pandangan Partai NasDem terkait dengan maraknya praktik mahar politik menjelang Pilkada?
2. Bagaimana seharusnya partai berperan dalam menyikapi praktik mahar politik tersebut?
3. Apa pandangan Partai NasDem terkait mahar itu sendiri?
4. Mengapa Partai NasDem mengambil langkah untuk mencetuskan politik tanpa mahar?
5. Bagaimana mekanisme implementasi politik tanpa mahar di dalam Pilkada?
6. Adakah aturan tertulis yang mengatur mekanisme gerakan politik tanpa mahar?
7. Bagaimana proses penentuan kandidat yang akan diusung, padahal kandidat yang diusung bukan kader partai?
8. Mengapa berani mengambil keputusan mengusung bukan kader partai dalam Pilkada DKI Jakarta?
9. Apakah Partai NasDem menanyakan pada saat awal pencalonan terkait dengan kemampuan finansial kandidat dalam menghadapi Pilkada?
10. Apakah ada kontrak politik yang dilakukan antara partai dengan kandidat?
11. Adakah kewajiban secara finansial yang harus dipenuhi oleh kandidat dalam Pilkada, apalagi Pilkada dilaksanakan dalam 2 putaran?
12. Apa jaminan tidak adanya praktik mahar politik?
13. Bagaimana skema pembiayaan dalam Pilkada, terkait dengan kewajiban yang dibebankan kepada kandidat, dan kewajiban yang dibebankan kepada partai?
14. Apa peran DPW dalam mendukung gerakan politik tanpa mahar?
15. Apa peran DPP dalam mendukung gerakan politik tanpa mahar?

Untuk Kandidat

1. Bagaimana penjelasan anda terkait indikasi adanya mahar politik pada saat awal pencalonan di Pilkada DKI Jakarta?
2. Jika benar ada mahar, mahar seperti apa yang disyaratkan oleh partai tersebut?

3. Apa tanggapan anda terkait dengan maraknya politik mahar dalam Pilkada?
4. Apa yang menyebabkan anda berubah pemikiran dari semula mencalonkan diri melalui jalur independen karena ada indikasi mahar politik, kemudian akhirnya mau menerima pinangan dari partai politik terutama Partai NasDem?
5. Bagaimana proses pencalonan anda oleh Partai NasDem sementara anda bukan merupakan kader partai?
6. Benarkah Partai NasDem tidak mensyaratkan mahar dalam mendukung anda?
7. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi oleh anda sebelum dan sesudah dicalonkan oleh partai NasDem?
8. Apakah Partai NasDem menanyakan pada saat awal pencalonan terkait dengan kemampuan finansial anda dalam menghadapi Pilkada?
9. Kewajiban finansial seperti apa saja yang menurut anda wajar untuk dikeluarkan dari kantong pribadi dalam Pilkada dan diberikan kepada partai?
10. Kewajiban apa yang menurut anda tidak wajar dan memiliki indikasi kepada mahar politik?
11. Adakah kontrak politik antara anda dengan Partai NasDem?
12. Bagaimana mekanisme pembagian finansial antara anda dan Partai NasDem untuk memenuhi kebutuhan selama Pilkada?

Untuk Bawaslu, KPU, dan Perludem

1. Bagaimana cara untuk mengontrol terkait keberadaan mahar politik terutama di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017?
2. Apakah ada temuan dari Bawaslu, KPU, dan Perludem terkait mahar politik di Partai NasDem?
3. Bagaimana peran dan masukan dari Bawaslu, KPU, dan Perludem dalam menghilangkan praktik mahar politik?

DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



Bersama Bapak Bestari Barus, SH.
(Wakil Ketua Bappilu DPW Partai NasDem DKI Jakarta)



Bersama Bapak Dedy Ramanta
(Wakil Sekjen Bid. Renlitbang DPP Partai NasDem)



Bersama Mas Fadli Ramadhani
(Peneliti Bidang Hukum Perludem)



Bersama Bapak Muhammad Jufri, S.Sos., M.SI
(Ketua Bawaslu DKI Jakarta)



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Terakreditasi A, 2014)
- Program Studi Ilmu Pemerintah (Terakreditasi A, 2014)
- Program Studi Ilmu Komunikasi (Terakreditasi A, 2013)

Nomor : 215/A.2-VIII/II/2018
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Eka Nugraha Putra
No. Mahasiswa : 20140520103
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi / Instansi Penelitian :

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Prov. DKI Jakarta

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasional Demokrat (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2018



Dr. Lili Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK.19690822 199603 163 038



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1325/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur DKI Jakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta

di Jakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 215/A.2-VIII/II/2018
Tanggal : 3 Februari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"KONSEP POLITIK TANPA MAHAR PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (STUDI KASUS PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017)"** kepada:

Nama : EKA NUGRAHA PUTRA
NIM : 20140520103
No.HP/Identitas : 085224842937/3206340112950004
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - DPW Partai Nasional Demokrat DKI Jakarta
- LAPAS Cipinang
Waktu Penelitian : 8 Februari 2018 s.d 8 Mei 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823
JAKARTA Kode Pos : 10110

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
NOMOR : 82/AF.1/31/-1.862.9/2018

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian.
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 549 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Kepala Badan KesbangPol DIY No. 074/1325/Kesbangpol/2018 tanggal 6 Februari 2018;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Wawancara, Studi Kepustakaan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, memberikan Surat Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

1. Nama : Eka Nugraha Putra
2. No. KTP : 3206340112950004
3. Alamat : Kp Babakan Tanjung RT 003/005 Kel Tanjungpura, Kec Rajapaloh, Kab Tasikmalaya
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Wawancara, Studi Kepustakaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Judul Penelitian : Konsep Politik tanpa Mahard Partai Nasional Demokrat (studi kasus Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)
- b. Tempat/Lokasi : DPW Partai Nasdem DKI, KPU DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta, Lapas Cipinang
- c. Bidang Penelitian : Politik
- d. Waktu : 8 Februari 2018 s.d 8 Mei 2018
- e. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 08 Februari 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil

Benny Wahyu Haryanto
NIP19711204199101101

Tembusan:
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Terakreditasi A, 2014)
- Program Studi Ilmu Pemerintah (Terakreditasi A, 2014)
- Program Studi Ilmu Komunikasi (Terakreditasi A, 2013)

Nomor : 217/A.2-VIII/II/2018
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Bestari Barus, S.H.
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Eka Nugraha Putra

No. Mahasiswa : 20140520103

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi / Instansi Penelitian :

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Prov. DKI Jakarta

Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasional Demokrat (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK.19690822 199603 163 038



UMY UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (Terakreditasi A, 2014)
- Program Studi Ilmu Pemerintah (Terakreditasi A, 2014)
- Program Studi Ilmu Komunikasi (Terakreditasi A, 2013)

Nomor : 216/A.2-VIII/II/2018
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Eksekutif Perludem
di Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapatkan gelar keserjanaan bagi mahasiswa, salah satu kewajibannya adalah menyusun Tulisan Ilmiah/Skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu berkenan untuk memberikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : Eka Nugraha Putra

No. Mahasiswa : 20140520103

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi / Instansi Penelitian :

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Prov. DKI Jakarta

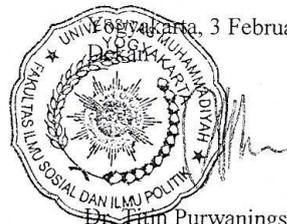
Waktu Penelitian :

3 (Tiga) bulan.

Judul Penelitian :

Konsep Politik Tanpa Mahar Partai Nasional Demokrat (Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 3 Februari 2018
Dr. ~~Purn~~ Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK.19690822 199603 163 038

ADDRESS
Kampus Terpadu UMY

CONTACT
Phone : +62 274 387656 ext.120

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA



FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: 006/PPID-010/11/2018

Nama : EKA NUGRAHA PUTRA
Alamat : KP. BABAKAN TANJUNG 03/05
Ds. TANJUNGPURA, KEC. RAJAPOLAH, KAB. TASIKMALAYA
Pekerjaan : MAHASISWA

Nomor Telepon/E-mail : 0852 2434 2937 / enugrahaputra@yahoo.co.id
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) : INFORMASI ~~PADA~~ LAPORAN PENERIMAAN DANA
KAMPANJE DAN SURAT KEPUTUSAN
DUKUNGAN PARPOL TERHADAP PASLOW
AKTOR - DIAPOT

Tujuan Penggunaan Informasi : UNTUK DATA TAMBAHAN SKRIPSI

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat***
 2. Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail

Jakarta, 15 Februari 2018

Pemohon Informasi

(EKA NUGRAHA PUTRA)
Nama dan Tanda Tangan

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan)

(Moh. Balha Uddin Chozini)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

WWW.PARTAINASDEM.ORG

MODEL B.1-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DPP PARTAI NASDEM
Nomor: 127 -Kpts/DPP-NasDem/IX/2016

Tentang

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017
DARI PARTAI NASDEM**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan mekanisme internal Partai NasDem dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, maka dengan ini menyetujui dan menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Nama Calon Gubernur : **Ir. Basuki Tjahaja Purnama, SE., MM**
2. Nama Calon Wakil Gubernur : **Djarot Saiful Hidayat**

Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari Partai NasDem.

Demikian Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 September 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM



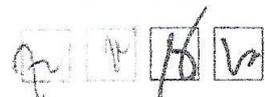
SURYA PALOH
Ketua Umum

Dewan Pimpinan
Partai NasDem

NINING INDRA SHALEH
Sekretaris Jenderal

Ternbusan Yth

1. Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem
2. Korwil DPP Partai NasDem Wilayah DKI Jakarta
3. Ketua DPW Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta
4. Sdr Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM
5. Sdr Djarot Saiful Hidayat
6. Arsip



SURAT PENCALONAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Partai Politik, yang meliputi:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan kursi sebanyak 28 kursi;
2. Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan kursi sebanyak 10 kursi;
3. Partai Golongan Karya dengan perolehan kursi sebanyak 9 kursi;
4. Partai NasDem dengan perolehan kursi sebanyak 5 kursi.

Jumlah keseluruhan kursi sebanyak 52 Kursi dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Provinsi sebanyak 106 kursi atau paling sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi sebanyak 4.537.227 suara sah.

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang didaftarkan :

1. Calon Gubernur :
Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM
2. Calon Wakil Gubernur :
Drs. H. DJAROT SYAIFUL HIDAYAT, M.Si

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



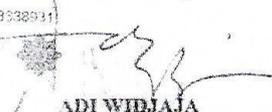
Jakarta, 29 September 2016

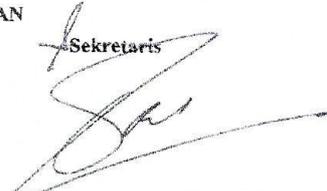
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik
Provinsi DKI Jakarta

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

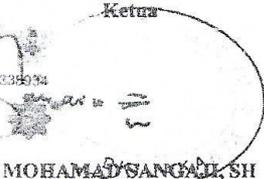
METERAI
TEMPEL
9D1D9AEF0092389311
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ketua

ADI WIDJAJA

Sekretaris

PRASETYO EDY MARSUDI, SH

Partai
HATI NURANI RAKYAT

METERAI
TEMPEL
08CF4AEF008334034
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ketua

MOHAMAD SANGAIL, SH

Sekretaris

VERY YONNEVIL, SH

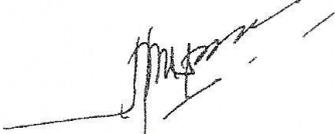
Partai
GOLONGAN KARYA

METERAI
TEMPEL
CBF87AEF008338946
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ketua

DR. IR. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom

DEWAN PIMPINAN
PARTAI
GOLKAR
DARI
DKI JAKARTA

Sekretaris

BASRI BACO

Partai
NASDEM

METERAI
TEMPEL
CB709AEF008338942
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ketua

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Dewan Pimpinan Wilayah
Partai NasDem
Propinsi DKI Jakarta

Sekretaris

WIBI ANDRINO



Ahok - Djarot

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM DAN Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS**

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode 2016 s/d 24 Oktober 2016**

Tanggal Pembukaan Rekening : 13 Oktober 2016
 Nama Bank : BCA KCP Kebon Sirih
 Nomor Rekening : 68156-77777

Nomor	Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan			
1.	Pasangan Calon	1,000,000		
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total)	208,938,000		
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	-		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-		
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	-		
6.	Lain-Lain Komitmen	-		
B.	Pengeluaran			
1.	Pengeluaran Operasi			
a.	Pertemuan terbatas	-		
b.	Pertemuan tatap muka	28,388,000		
c.	Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak			
d.	Pembuatan design alat peraga kampanye	51,050,000		
e.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan			
g.	Lain-lain	91,473,100		
2.	Pengeluaran Modal			
a.	Pembelian Kendaraan			
b.	Pembelian Peralatan	11,774,800		
c.	Lain-lain			
3.	Pengeluaran lain-lain			
a.	Pemberian Piutang			
b.	Pembayaran Utang			



Ahok - Djarot

Nomor	Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
C.	SALDO PER			
	Kas di Rekening Khusus	1,000,000		
	Kas di Tangan (Cash on Hand)	26,252,100		
	Barang			
	Tagihan kepada			
	Utang			

CALON GUBERNUR

Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM



CALON WAKIL GUBERNUR

Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS

Lampiran LPSDK 1
+ Daftar Penyumbang
dalam dokumen
terpisah



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM. DAN DRS. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS.

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE 25 OKTOBER 2016 s/d 19 DESEMBER 2016

Tanggal Pembukaan Rekening : 13 Oktober 2016
Nomor Bank : BCA KCP Kebon Sirih
Nomor Rekening : 68156-77777

NOMOR	URAIAN	RP.	UNT	KETERANGAN
A	Penerimaan			
1	Pasangan Calon	1.000.000		Tidak berubah sejak LADK
2	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	208.838.000		Tidak berubah sejak LADK
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	18.503.505.222		Data penyumbang terlampir
4	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	4.752.000.000		Data penyumbang terlampir
5	Sumbangan yang formulir KPU belum lengkap	24.746.627.148		Banyak formulir yang masih harus dilengkapi NPWP dan KTP, dan diserahkan ke Timses. Pada umumnya, ada jeda 1-2 minggu dari saat uang masuk sampai dengan formulir diterima dengan lengkap dan tuntas.
	TOTAL PENERIMAAN	48.004.132.370		
B	Pengeluaran			
1	Pengeluaran Operasi			
a.	Perjalanan Terbatas	1.610.000		
b.	Perjalanan tetap muda	2.634.185.800		
c.	Pembuatan/ Produksi iklan di media massa	-		
d.	Pembuatan desain alat peraga kampanye	254.584.900		
e.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	-		
f.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan	-		
g.	Peralatan	284.012.883		
h.	Konsumsi	345.305.461		
i.	Logistik Rumah Tangga	83.581.192		
j.	Perengkapan Rumah Tangga	72.859.784		
k.	Transportasi	36.980.980		
l.	Uniform Timses	11.590.000		
g.	Lain-lain	-		
	Total Pengeluaran Biaya Operasional	3.824.711.116		
2	Pengeluaran Administrasi			
a.	ATK	79.119.700		
b.	Honor Tenaga Kerja	174.750.000		
c.	Air	95.358		
d.	Listrik	9.468.233		
e.	Internet, TV Kabel	10.026.322		
f.	Telekomunikasi	2.173.121		
g.	Lain-lain	11.018.225		
	Total Biaya Pengeluaran Administrasi	286.646.959		
3	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Pemberian Pinang	-		
b.	Pembayaran Utang	-		
A	Biaya Konsultan	1.910.625.000		
	Total Biaya Konsultan	1.910.625.000		
5	Biaya Operasional Posko BasDjar	182.187.000		
	Total Biaya Operasional Posko BasDjar	182.187.000		
	TOTAL PENGELUARAN	5.984.170.069		

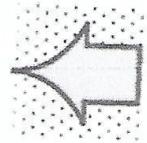
Jakarta, 20 Desember 2016

CALON GUBERNUR


Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM.

CALON WAKIL GUBERNUR

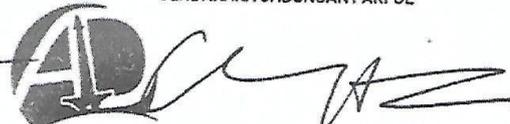

Ahok - Djarot Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS.



KETUA GABUNGAN PARTAI


Prasetyo Edi Marsudi, SH

BENDAHARA GABUNGAN PARTAI


Ahok - Djarot Charles Honoris

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon dan Gabungan Partai Politik

3

LPPDK2-PARPOL



**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA, MM DAN Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 Oktober 2016 s/d 10 Februari 2017**

Tanggal Pembukaan Rekening : 13 Oktober 2016
Nama Bank : BCA KCP Kebon Sirih
Nomor Rekening : 68156-7777

Nomor	Uraian	Rp
A.	Saldo PER 10 Februari 2017	6,493,398,912
	Kas di Rekening Khusus	6,452,394,952
	Kas di tangan	41,003,960
	Barang	-
	Tagihan kepada	-
	Utang	-
B.	Penerimaan	
1	Pasangan Calon	1,000,000
2	Partai Politik dan / atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan)	-
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	42,907,689,780
4	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	-
5	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	15,487,500,000
6	Lain - Lain Komitmen	-
7	Uncollected Form	1,772,030,825
8	Penerimaan Lain-lain (Bank)	22,139,420
	TOTAL PENERIMAAN	60,190,360,025
C.	Pengeluaran	
1.	Pengeluaran Operasional	
a.	Pertemuan terbatas	9,291,027,250
b.	Pertemuan tatap muka	7,389,499,642
c.	Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik	217,085,000
d.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	24,517,957,500
e.	Pembuatan design alat peraga kampanye	223,142,652
f.	Rapat Umum	5,311,722,300
g.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan	1,879,024,660
h.	Lain-lain:	
1	ATK	6,884,300
2	Honor Tenaga Kerja	851,900,000
3	Keamanan	799,000,000
4	Transportasi	135,562,485
5	Lain-lain	695,568,620
6	Operasional Posko	1,445,166,704
i.	Jasa Manajemen / Konsultan	
1	Konsultan Media	537,050,000
2	Konsultan Lainnya	-
2.	Pengeluaran Modal	
a.	Pembelian Kendaraan	-
b.	Pembelian Peralatan	396,370,000
c.	Lain-lain	-

Nomor	Urutan	Rp
C.	Pengeluaran	
1.	Pengeluaran Operasional	
	a. Pertemuan terbatas	9,291,027,250
	b. Pertemuan tatap muka	7,389,499,642
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik	217,085,000
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum	24,517,957,500
	e. Pembuatan design alat peraga kampanye	223,142,652
	f. Rapat Umum	5,311,722,300
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan	1,879,024,660
	h. Lain-lain:	
	1 ATK	6,884,300
	2 Honor Tenaga Kerja	851,900,000
	3 Keamanan	799,000,000
	4 Transportasi	135,562,485
	5 Lain-lain	695,568,620
	6 Operasional Posko	1,445,166,704
	i. Jasa Manajemen / Konsultan	
	1 Konsultan Media	537,050,000
	2 Konsultan Lainnya	-
2.	Pengeluaran Modal	
	a. Pembelian Kendaraan	-
	b. Pembelian Peralatan	396,370,000
	c. Lain-lain	-
3.	Pengeluaran lain-lain	
	a. Pemberian Piutang	-
	b. Pembayaran Utang	-
	TOTAL PENGELUARAN	53,696,961,113
D.	SALDO PER 10 Februari 2017	6,493,398,912
	Kas di Rekening Khusus ✓	6,452,394,952
	Kas di tangan ✓	41,003,960
	Barang	-
	Tagihan kepada	-
	Utang	-

CALON GUBERNUR


BA_DJA
 BASUKI - DJAROT

Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM

CALON WAKIL GUBERNUR


BA_DJA
 DARSY - DJAROT

Drs. H. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS